

ISU Sepekan

BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Minggu ke 2 Bulan Mei 2021 (tanggal 7 s.d.13 Mei)

PAPUA DAN ISU MELANESIA

Humphrey Wangke

Peneliti Utama/Hubungan Internasional

Humphrey.wangke@dpr.go.id



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pelabelan teroris pada kelompok keamanan bersenjata di Papua menuai masalah di luar negeri. Negara Vanuatu yang terletak di Pasifik Selatan semakin agresif mendorong isu Papua merdeka. Negara ini terus mempertahankan dukungan kuatnya untuk isu West Papua atau West New Guinea. Solidaritas atas nama etnis Melanesia dan tuduhan pelanggaran HAM menjadi dasarnya. PM Vanuatu Bob Loughman menegaskan dukungan kuat negaranya terhadap kemerdekaan Papua tidak akan surut.

Menanggapi sikap Vanuatu tersebut, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto mengatakan isu solidaritas etnis Melanesia adalah komoditas politik domestik Vanuatu yang strategis karena mendapat perhatian dan dukungan luas masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan yang agresif dengan mempersempit manuver Vanuatu di berbagai forum. Pemerintah Indonesia juga membangun kemitraan dengan negara-negara di Pasifik dengan memberikan bantuan kerjasama teknis dan pembangunan kepada negara-negara di Pasifik kecuali Vanuatu.

Perlu dipikirkan bagaimana cara rekonsiliasi sesuai dengan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah harus bisa meyakinkan secara eksternal maupun internal bahwa pelabelan teroris bukan untuk masyarakat Papua, melainkan kelompok pembuat teror. KKB yang dipimpin Lekagak Telenggen di Kabupaten Puncak dan sejumlah kelompok lainnya harus bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik, hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas umum.

Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik menambahkan bahwa Papua saat ini tengah menghadapi masalah besar mengenai tata kelola. Apabila tidak segera dibenahi, permasalahan dalam pemerintahan akan memicu ketidakpuasan masyarakat. Persoalan-persoalan tata kelola (pemerintahan) adalah persoalan terbesar yang dihadapi Papua selama ini dan ke depan. Sebenarnya ada sejumlah tujuan dari berlakunya otonomi khusus Papua antara lain meningkatnya taraf hidup, mewujudkan keadilan, dan pemerataan percepatan pembangunan orang asli Papua. Selain itu, penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, namun kenyataannya ada beberapa regulasi berkaitan dengan otsus Papua yang masih berbenturan dengan regulasi teknis di tingkat pusat.

SUMBER

Kompas, 10 dan 12 Mei 2021; Media Indonesia, 11 Mei 2021.